



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2019



DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN ROKAN HILIR
JALAN GEDUNG NASIONAL NO.4 BAGANSIAPIPI



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir, dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan Dinas Perindustrian Perdagangan dan pasar Kabupaten Rokan Hilir dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Substansi LAKIP ini menginformasikan capaian kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019, yang terkait dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019, yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar dan merupakan mata rantai capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya.

Dengan diterbitkannya LAKIP Tahun 2019 ini, diharapkan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Akhir kata, kami berharap agar LAKIP Tahun 2019 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja bagi aparatur Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir.

Bagansiapiapi, Februari 2020

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
DAN PASAR KABUPATEN ROKAN HILIR



Drs. H. SUKRIYAL FALAH, M. Si
Pembina Muda
NIP. 198602 1 002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), khususnya dalam menciptakan transparansi yang merupakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, melalui penyediaan dan penyampaian informasi serta menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Demikian pula dalam upaya menciptakan pemerintahan yang akuntabel sebagaimana yang diamanatkan oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka sebagaimana implementasi akuntabilitas, pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

LAKIP disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur tentang Pelaporan Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawabn kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 dari dana APBD Kabupaten Rokan Hilir sebesar **Rp. 25.946.803.066,-** terdiri dari belanja tidak langsung **Rp. 6.296.879.566,-** dan Belanja Langsng **Rp. 19.649.923.500,-** sebagai upaya mewujudkan visi dan misi organisasi yang tertuang didalam 14 program dan 73 kegiatan.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.4. Gambaran Umum Pelayanan	7
1.5. Sumber Daya Manusia	11
1.6. Keuangan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1. Rencana Strategis Tahun 2016-2021	20
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	26
2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	28
2.4. Perjanjian Kinerja	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	33
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama	34
3.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis	39
3.4. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis	41
3.5. Akuntabilitas Keuangan	53
BAB IV PENUTUP	56



DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah Pegawai per 1 Desember 2019 Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin	11
1.2	Jumlah Pegawai Menurut Gol, Ruang per 1 Desember 2019	11
1.3	Jumlah Pegawai Menurut Pangkat per 1 Desember 2019	11
1.4	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Struktural/ Perjenjangan per 1 Desember 2019	12
1.5	Jumlah Pegawai Menurut Bidang 1 Desember 2019	13
1.6	Jumlah Rasio Pegawai Disperindagsar Terhadap Jumlah Pegawai Kabupaten Rokan Hilir per 1 Desember 2019	13
1.7	Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja	13
1.8	Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019	15
2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir	27
2.3	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019	29
2.4	Perjanjian Kinerja Tahunan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019	31
3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja	33
3.2	Predikat Nilai Capaian Kinerja < 100%	33
3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019	34
3.4	Predikat Capaian Kinerja	35
3.5	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 dan 2019 ...	36
3.6	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2019	40
3.7	Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Mutu Produk Industri	43
3.8	Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Produksi Industri Kreatif	44
3.9	Realisasi Indikator Sasaran Terwujudnya Sentra IKM yang Berbasis Potensi Daerah	45
3.10	Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Jumlah Wirausaha IKM	47
3.11	Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Nilai Ekspor	48
3.12	Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Usaha Sektor Perdagangan yang Berkelanjutan dan Berkualitas	49



3.13 Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana Perdagangan	50
3.14 Realisasi Indikator Sasaran Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	51
3.15 Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	52
3.16 Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	53
3.17 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2019	54



DAFTAR GAMBAR

1.1	Struktur Organisasi Disperindag	7
-----	---------------------------------------	---



DAFTAR GRAFIK

1.1	Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019	14
1.2	Realisasi Jenis Belanja Terhadap Total Realisasi Anggaran	14
3.1	Capaian IKU Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir	36
3.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir	41



BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan tingkat kinerja yang selalu meningkat bentuk perwujudannya dapat dilakukan melalui pertanggungjawaban. Seperti yang telah diamanatkan dalam Tap. MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dibutuhkan suatu bentuk pertanggungjawaban terkait pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata secara periodik.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan menjadikan peraturan tersebut sebagai acuan setiap instansi dalam menyusun dokumen penetapan kinerja dan Lakip.

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan susunan organisasi yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir serta Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan bagian perangkat daerah yang berperan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perdagangan dan pasar, juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Kewajiban sebagaimana tersebut diatas dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.



Sebagai gambaran keberhasilan dan ketidaktercapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun 2019, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

I.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pada pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Seiring dengan prinsip akuntabilitas, ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera melalui program peningkatan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Rokan Hilir merupakan kegiatan rutin tahunan, yang disusun dengan berpedoman pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

I.3. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

I.3.1. Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah bidang perindustrian dan perdagangan.

I.3.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang industri, perdagangan, metrologi dan tertib niaga, dan pasar;



- b. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang industri, perdagangan, metrology dan tertib niaga, dan pasar;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang industri, perdagangan, metrologi dan tertib niaga, dan pasar;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengawasan dibidang industri, perdagangan, metrologi dan tertib niaga, dan pasar;
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis dibidang dibidang industri, perdagangan, metrologi dan tertib niaga, dan pasar sesuai dengan kewenangan daerah;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

I.3.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir serta Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir, yang terdiri dari :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;

B. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas subbagian umum dan kepegawaian, subbagian Perencanaan dan Evaluasi, dan subbagian keuangan serta melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

B.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, kerumahtanggaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, dokumentasi, tata usaha dan manajemen kepegawaian Dinas serta penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas.

B.2. Sub Bagian Perencanaan dan Program

Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, data dan informasi; monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas;



B.3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan pelaporan keuangan dan barang milik Daerah.

C. Bidang Industri

Bidang Industri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya saing industri, pengembangan iklim usaha industri, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, pengembangan sarana dan kawasan industri, pengawasan dan pengendalian serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

C.1. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri

Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan disektor pembangunan Sumber Daya Industri, pembangunan kompetensi teknis dan manajerial, melaksanakan pengaturan pemanfaatan sumber daya alam industri serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;

C.2. Seksi Sarana dan Prasarana Industri

Seksi Sarana dan Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah disektor standarisasi industri, pelaksanaan penerapan SNI, pengembanagn spesifikasi teknis, pengembanagn infrastruktur industry serta menyiapkan bahan kajian pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri;

C.3. Seksi Pemberdayaan, Pengendalian dan Pengawsan Industri

Seksi Pemberdayaan, Pengendalian dan Pengawsan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah disektor pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan daerah, pelaksanaan penerapan industri hijau sebagai upaya menciptakan industri yang ramah lingkungan, melakukan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah disektor peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta melakukan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di sektor pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha industri.

D. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, pengendalian harga dan ketersediaan barang pokok dan atau barang penting, pengembangan ekspor,



pengembangan dan penguatan usaha di bidang Perdagangan Dalam Negeri, pemberian fasilitas pengembangan sarana usaha perdagangan, pengelolaan sistem informasi perdagangan, perdagangan antar pulau, pengembangan iklim usaha perdagangan, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

D.1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri

Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perizinan dan pendaftaran perusahaan, pengendalian harga dan ketersediaan barang pokok dan atau barang penting, pengembangan dan penguatan usaha perdagangan dalam negeri, pengelolaan sistem informasi perdagangan dalam negeri, perdagangan antar pulau, pengembangan iklim usaha perdagangan, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;

D.2. Seksi Perdagangan Luar Negeri

Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan ekspor, pengembangan dan penguatan usaha di bidang perdagangan luar negeri, pemantauan hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional/bilateral, dan pengelolaan sistem informasi perdagangan luar negeri.

D.3. Seksi Logistik dan Sarana Distribusi

Seksi Logistik dan Sarana Distribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan logistik Daerah, sarana distribusi perdagangan, pembiayaan resi gudang, dan pemberian fasilitas pengembangan sarana usaha perdagangan.

E. Bidang Metrologi dan Tertib Niaga

Bidang Metrologi dan Tertib Niaga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pengembangan dan pembinaan kemetrologian, pembinaan jabatan fungsional kemetrologian, pengawasan kemetrologian, pelayanan tera/tera ulang dan tertib niaga.



E.1. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kemetrologian

Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kemetrologian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan pembinaan kemetrologian serta pembinaan jabatan fungsional kemetrologian.

E.2. Seksi Pengawasan Kemetrologian dan Tertib Niaga

Seksi Pengawasan Kemetrologian dan Tertib Niaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan kemetrologian dan tertib Niaga.

E.3. Seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Tera/Tera Ulang.

F. Bidang Pasar

Bidang Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pengembangan, pemberdayaan dan pengelolaan Pasar;

F.1. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar

Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar.

F.2. Seksi Pengelolaan dan Ketertiban Pasar

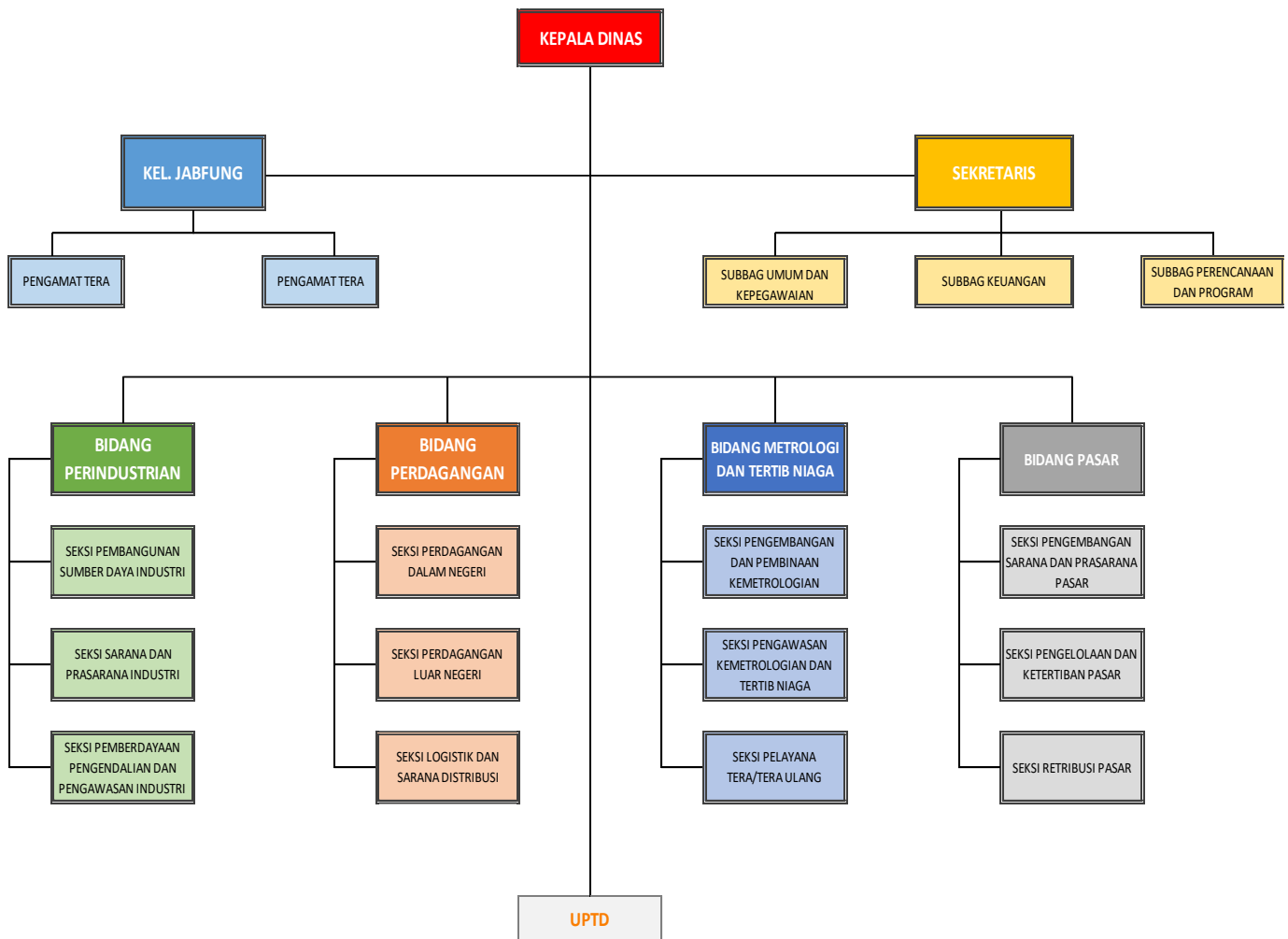
Seksi Pengelolaan dan Ketertiban Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan ketertiban pasar termasuk penataan pasar dan pembinaan pedagang.

F.3. Seksi Retribusi Pasar

Seksi Retribusi Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan retribusi pasar.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar
Kabupaten Rokan Hilir



I.4. GAMBARAN UMUM PELAYANAN

Secara umum Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir mengemban tugas dibidang perindustrian dan perdagangan.

1. Bidang Perindustrian

Kinerja sektor perindustrian (Industri Pengolahan) apabila dilihat dari kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga Berlaku tahun 2010 sebesar 14,62% dan pada tahun 2014 naik menjadi 18,19 % (*tabel 2.13*). Secara nominal rupiah juga terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, dan presentasi kontribusi peningkatannya masih lebih baik dari peningkatan sektor lainnya.



Berdasarkan data tahun 2016, seluruh jumlah industri di Kabupaten Rokan Hilir tercatat mencapai 418 unit usaha dengan melibatkan jumlah tenaga kerja sebanyak 2469 orang. Bila dibandingkan tahun 2008, industri mengalami kenaikan sebesar 46,41 % di tahun 2011. Komposisi industri terdiri 288 unit industri hasil pertanian dan kehutanan; 119 unit industri logam, mesin dan kimia; dan 11 unit industri aneka. Dari segi penyebaran industri, kegiatan atau aktivitas industri masih terlokasi di kecamatan Bangko dan Bagansinembah dengan rasio 54,31 %. Sehingga dapat dikatakan penyebaran industri belum merata di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

Pelayanan di bidang perindustrian lebih banyak kepada pembinaan, pendampingan dan fasilitasi terhadap IKM dalam pengembangan usaha termasuk penumbuhan wirausaha baru. Pembinaan yang dilakukan mencakup pembinaan proses produksi, desain dan kemasan, motivasi, manajemen usaha, peningkatan keterampilan, peningkatan teknologi sampai pada pembinaan promosi dan pemasaran. Untuk fasilitasi yang diberikan antara lain fasilitasi kerjasama kemitraan, fasilitasi pengembangan teknologi, desain dan kemasan sampai dengan fasilitasi promosi dan pemasaran. Sedangkan pendampingan dilakukan agar proses pembinaan dan fasilitasi bisa berjalan secara efektif dan berkesinambungan.

2. Bidang Perdagangan

Keberadaan Rokan Hilir di daerah perbatasan Malaysia memberi implikasi pada kinerja ekspor barang/jasa. Tahun 2014, kinerja ekspor Rokan Hilir mencapai US\$ 7,36 juta dan mengalami kenaikan 228 % bila dibandingkan tahun 2013. Barang utama ekspor masih didominasi barang mentah, yakni ikan segar dan hasil tangkap perikanan lainnya. Barang industri yang dihasilkan industri manufaktur belum mampu mendongkrak kinerja ekspor Rokan Hilir.

Kegiatan impor belum terjadi di pelabuhan Rokan Hilir karena barang impor yang masuk ke Rokan Hilir masih melalui pelabuhan di luar wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

Secara umum, kegiatan perdagangan dalam negeri didominasi perdagangan eceran di sektor barang kebutuhan pokok, barang bangunan, produk pangan olahan serta didukung perdagangan barang mobil dan motor. Pasar rakyat yang merupakan simpul kekuatan ekonomi lokal, telah mampu memberi kontribusi perekonomian daerah dengan populasi pasar sebesar 76 unit.

Penguatan pasar dalam negeri dalam meningkatkan investasi dan iklim usaha daerah dilakukan dalam upaya menjaga kekuatan ekonomi daerah supaya pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan meningkat yang disumbangkan oleh kekuatan sektor perdagangan. Indikasi semakin kuatnya pasar dalam negeri dapat dilihat dari peran Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor yang memberikan kontribusi cukup pada perekonomian daerah. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor selama periode 2010 – 2014 memberi kontribusi PDRB sebesar 3.78 – 4.54 persen terhadap perekonomian daerah, dengan tingkat pertumbuhan rata – rata 4.24%. Kontribusi tersebut



terhadap perekonomian daerah masih dikatakan kecil bila dibandingkan angka nasional dimana dalam periode 2004 – 2014, Perdagangan Besar dan Eceran memberi kontribusi sebesar 13,42 – 15,05 persen terhadap perekonomian nasional. Kecilnya kontribusi perdagangan terhadap perekonomian daerah disebabkan beberapa hal, antara lain investasi sektor perdagangan masih belum optimal, pasar rakyat yang ada belum mampu menjadi kekuatan ekonomi lokal.

Pelayanan perizinan sektor perdagangan dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu, yakni Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Kecamatan (PATEN). Untuk perizinan khusus sesuai kewenangannya, masih ditangani Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir. Kondusifitas usaha perdagangan di Kabupaten Rokan Hilir telah melahirkan pelaku usaha baik berbentuk lembaga maupun non lembaga, yakni :

- Distributor dan Pengecer Pupuk Subsidi masing – masing 5 unit dan 51 unit
- Pasar rakyat : 76 unit
- Toko modern : 20 unit
- Pengusaha perdagangan/toko : 317 unit
- Gudang yang terdaftar : 3 unit
- Pengecer minuman beralkohol : 5 unit

Kehadiran pelaku usaha tersebut di atas tidak diiringi dengan kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan legalitas usaha sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Pengawasan barang beredar dan alat ukur, takaran, timbangan dan perlengkapan lainnya (UTTP) merupakan bagian usaha dalam upaya meningkatkan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan perekonomian yang sehat melalui keseimbangan antara perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Hanya melalui keberadaan dan keberdayaan perlindungan konsumen yang memadai, Kabupaten Rokan Hilir dapat mendorong mewujudkan Indonesia dalam upaya membangun kualitas manusia yang berharkat, bermartabat, sehat, cerdas, kuat, inovatif dan produktif sehingga mampu berkontribusi membawa Indonesia menuju ketahanan nasional dan berdaya saing di kancah Internasional. Peran Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan perlindungan konsumen dilakukan melalui pengawasan barang beredar dan atau jasa, pengawasan barang yang diatur tata niaga, dan pengawasan UTTP. Sejak tahun 2012, dalam upaya peningkatan perlindungan konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir telah menyelenggarakan aksi pengawasan barang beredar dan atau jasa, pengawasan barang yang diatur tata niaga (LPG 3 Kg, Pupuk Subsidi, dan Minuman Beralkohol), dan pengawasan UTTP. Setiap aksi pengawasan yang dilakukan



terhadap barang dan atau jasa yang tidak sesuai ketentuan, ditindaklanjuti berupa pembinaan.

Dalam upaya membangun citra produk lokal dan memperluas akses pasar bagi produk UMKM serta membangun jejaring dengan *buyer*, salah satu langkah yang dilakukan adalah intensifikasi promosi dagang. Kegiatan promosi dagang dilakukan dalam bentuk partisipasi pada kegiatan pameran yang diselenggarakan pihak lain. Selama kurun waktu 2012 – 2016, dalam upaya intensifikasi promosi dagang Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan pameran yang diselenggarakan baik tingkat Kabupaten Rokan Hilir, tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Dalam upaya menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok perlu dilakukan penguatan pasokan dan jaringan distribusi barang terutama di pasar rakyat yang merupakan titik sentral perdagangan komoditi barang kebutuhan pokok. Penguatan pasokan dan jaringan distribusi barang dilakukan dengan tetap menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat produsen, distributor dan pengecer serta meningkatkan kuantitas dan kualitas pasar rakyat. **Pertama**, stabilisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat tersebut dipantau dalam waktu tertentu dengan cara mengumpulkan data harga dan stok komoditi barang. Data harga dan stok komoditi tersebut diolah untuk dapat memberi keterangan indikatif berupa koefisien variasi harga rata – rata, yang dijadikan indikasi stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Selama kurun waktu 2012 – 2016, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir telah menyediakan informasi harga barang kebutuhan komoditi, yakni beras, minyak goreng (curah dan kemasan), gula, ayam potong, daging, bawang, cabe, tepung terigu, telur, dan ikan. Bahkan informasi harga tersebut telah disediakan dalam bentuk aplikasi sistem informasi harga barang kebutuhan pokok secara cepat. **Kedua**, stabilisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok perlu didukung dengan sarana distribusi yang kondusif dan berdaya saing. Untuk mencapai kondisi tersebut, perlu dilakukan pengembangan sarana distribusi yang dilakukan melalui revitalisasi pasar rakyat. Revitalisasi pasar rakyat diyakini dapat menghilangkan dikotomi pasar modern dengan pasar rakyat. Selain itu, pasar rakyat yang direvitalisasi dapat meningkatkan omset pasar. Dalam kurun waktu tersebut, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir (urusan pasar dikelola oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pasar) telah melakukan revitalisasi pasar rakyat. Revitalisasi pasar rakyat yang dilakukan baru berupa perbaikan fisik pasar, yang belum menyentuh perbaikan manajemen pengelolaan pasar. **Ketiga**, untuk menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok lainnya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir juga menyediakan sarana perdagangan berupa gerobak dan kendaraan bermotor plus coolbox yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil.



I.5. SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel I.1

Jumlah Pegawai per 1 Desember 2019 menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Pendidikan	Jumlah		Jumlah
		Pria	Wanita	
1.	Pasca Sarjana	3	2	5
2.	Sarjana	13	8	21
3.	Sarjana Muda/D3	2	1	3
4.	SLTA	10	4	14
5.	SLTP	0	0	0
6.	SD/SR	0	0	0
	Jumlah	28	15	43

Tabel I.2

Jumlah Pegawai Menurut Gol. Ruang per 1 Desember 2019

No.	Gol. Ruang	Jumlah	Keterangan
1.	I	1	-
2.	II	15	-
3.	III	24	-
4.	IV	4	-
	JUMLAH	43	-

Tabel I.3

Jumlah Pegawai Menurut Pangkat per 1 Desember 2019

No.	Pangkat	Jumlah		Jumlah
		Pria	Wanita	
1.	IV/d	-	-	-
2.	IV/c	1	-	1
3.	IV/b	-	-	-
4.	IV/a	3	-	3
		4	-	4
1.	III/d	1	4	5



2.	III/c	6	4	10
3.	III/b	5	1	6
4.	III/a	1	2	3
		13	11	24
1.	II/d	1	1	2
2.	II/c	5	2	7
3.	II/b	5	-	5
4.	II/a	-	1	1
		11	4	15
1.	I/d	-	-	-
2.	I/c	-	-	-
3.	I/b	-	-	-
4.	I/a	-	-	-
		0	-	-
JUMLAH PEGAWAI		28	15	43

Tabel I.4

Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Struktural/Penjenjangan 1 Desember 2019

No.	Diklat	Jumlah	Keterangan
1.	Diklatpim Tk.I	-	-
2.	Diklatpim Tk.II	1	-
3.	Diklatpim Tk.III	5	-
4.	ADUM	-	-
5.	Diklatpim Tk.IV	3	-
	Jumlah	9	-



Tabel I.5

Jumlah Pegawai Menurut Bidang 1 Desember 2019

No.	Urusan	Jumlah	Keterangan
1.	Industri	7 orang	
2.	Perdagangan	7 orang	
3.	Pasar	6 orang	
4.	Metrologi	8 orang	
	Jumlah	28 orang	

Tabel I.6

Jumlah Rasio Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Terhadap Jumlah Pegawai Kabupaten Rokan Hilir per 1 Desember 2019

No.	Urusan	Jumlah	Keterangan
1.	Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Rokan Hilir	43 Orang	
2.	Pegawai Kabupaten Rokan Hilir	6203 orang	(Data BKPSDM)
	Rasio	0,69	

I.6. KEUANGAN

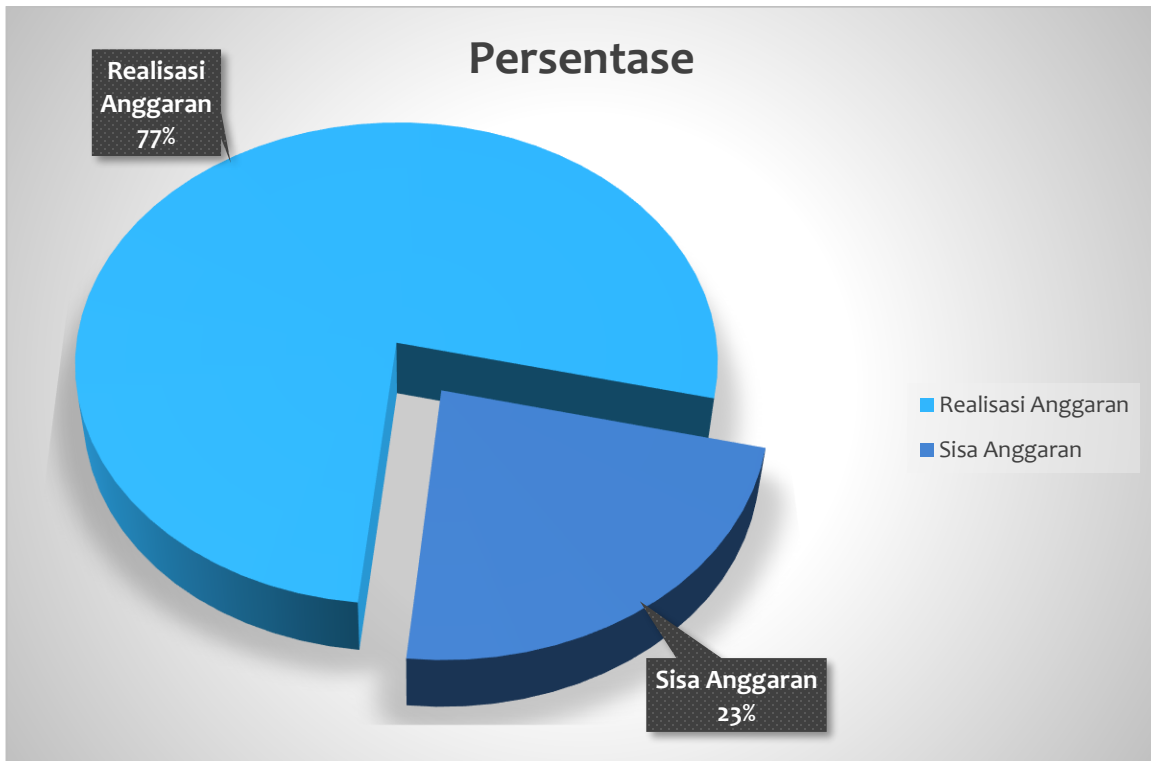
Jumlah anggaran belanja tahun 2019 adalah sebesar Rp.25.946.803.066,- dengan realisasi sebesar Rp.20.098.462.120,- atau 77,46% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I.7

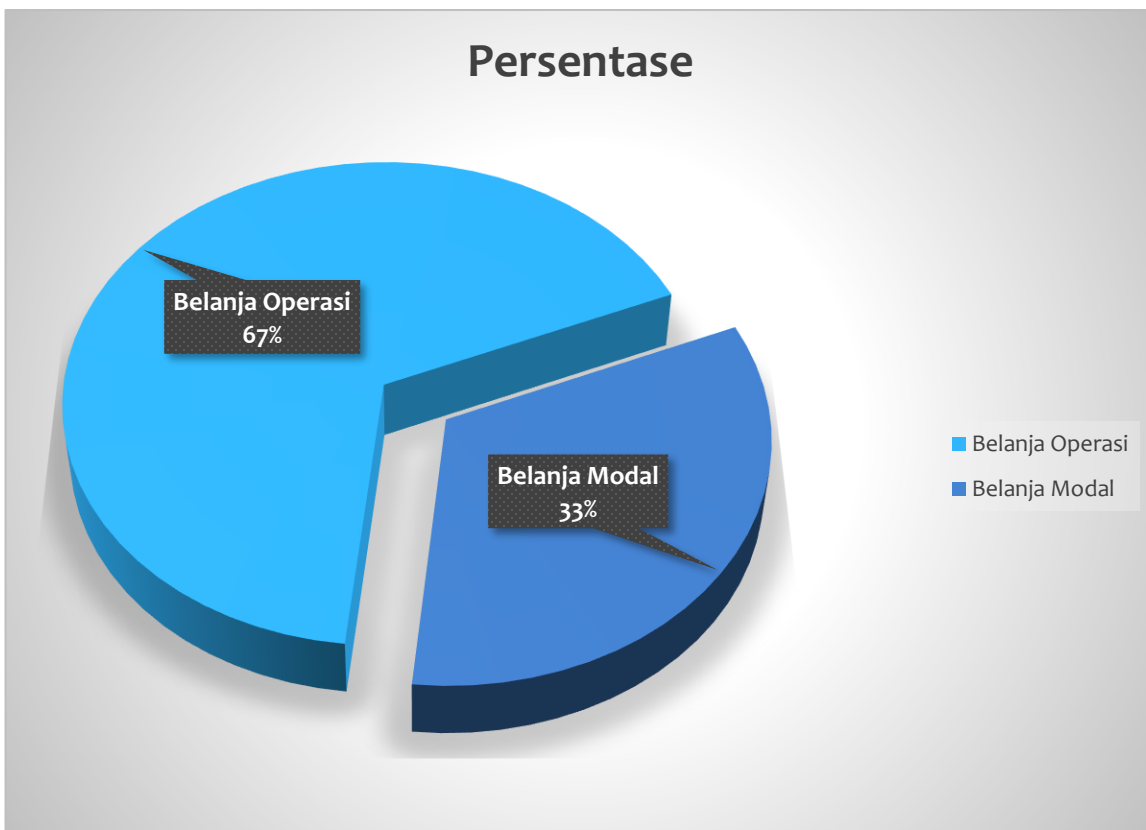
Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja

No	Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	18.522.047.636,-	13.491.254.770,-	72,83
	a. Belanja Pegawai	6.296.879.566,-	5.286.908.751,-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	12.225.168.070,-	8.204.346.019,-	
2.	Belanja Modal	7.424.755.430,-	6.607.207.350,-	88,98
	Jumlah	25.946.803.066,-	20.098.462.120	77,46

Grafik 1.1
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019



Grafik 1.2
Realisasi Jenis Belanja Terhadap Total Realisasi Anggaran 2019





Tabel I.8
Kegiatan, Anggaran, dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6,296,879,566	5,286,908,751	84
	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2,198,698,234	2,017,345,798	92
	Tunjangan Keluarga	216,704,075	187,757,092	87
	Tunjangan Jabatan	224,469,750	206,030,000	92
	Tunjangan Fungsional	5,760,000	4,320,000	75
	Tunjangan Fungsional Umum	70,325,500	60,200,000	86
	Tunjangan Beras	130,355,000	112,902,780	87
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5,227,930	3,646,656	70
	Pembulatan Gaji	1,126,167	35,811	3
	Iuran Jaminan Kesehatan	62,617,218	56,584,619	90
	Iuran Jaminan Kematian	13,902,504	12,425,239	89
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5,234,188	4,141,756	79
	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	162,000,000	150,600,000	93
	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	3,200,459,000	2,470,919,000	77
B	BELANJA LANGSUNG	19,649,923,500	14,811,553,369	75
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,010,800,000	1,655,833,277	82
	Penyediaan jasa surat menyurat	17,000,000	17,000,000	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	330,000,000	215,434,056	65
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	60,000,000	30,446,000	51
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	216,000,000	153,600,000	71
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	-	-
	Penyediaan alat tulis kantor	100,000,000	99,088,000	99
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100,000,000	96,666,250	97
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	44,000,000	43,876,000	100
	Penyediaan peralatan rumah tangga	38,000,000	37,969,000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	80,000,000	45,700,000	57
	Penyediaan makanan dan minuman	60,000,000	51,500,000	86
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	650,000,000	648,409,471	100
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	150,000,000	53,964,000	36
	Penyusunan inventaris aset SKPD	18,800,000	15,180,500	81



	Pengadaan aplikasi sistem e-office terpadu	147,000,000	147,000,000	100
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,603,150,000	3,192,763,738	89
	Penimbunan halaman belakang kantor Metrologi	149,500,000	147,910,000	99
	Semenisasi halaman kantor Metrologi	210,000,000	206,265,000	98
	Pembuatan taman kantor Metrologi	99,500,000	96,646,000	97
	Perencanaan Gedung Workshop Industri/Baru	50,000,000	46,915,000	94
	Penyediaan bahan bakar genset (solar)	-	-	-
	Pengadaan AC	50,000,000	49,225,000	98
	Pengadaan partisi meubeler kantor	200,000,000	196,900,000	98
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (teralis) baru	52,800,000	46,226,000	88
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Laptop)	50,000,000	48,889,500	98
	Pengadaan Mebeleur Gedung Kantor	172,000,000	164,780,000	96
	Pengadaan Printer	100,000,000	73,975,000	74
	Pengadaan Komputer	131,000,000	124,500,000	95
	Pengadaan peralatan gedung kantor berupa UPS	130,000,000	-	-
	Pengadaan peralatan gedung kantor berupa alat komunikasi kantor	15,000,000	12,162,000	81
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor berupa stabilizer	50,000,000	47,520,000	95
	Pengadaan alat ukur UTTP Kemetrolagian	200,000,000	198,825,000	99
	Pengadaan perangkat running text	200,000,000	188,454,000	94
	Pengadaan Lemari arsip	85,000,000	82,500,000	97
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	100,000,000	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	50,000,000	49,083,400	98
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	560,000,000	551,834,400	99
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	240,200,000	224,698,888	94
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	78,150,000	70,519,000	90
	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	168,000,000	123,392,550	73
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	200,000,000	186,655,000	93
	Perencanaan Rehap Berat Kantor Disperindagsar/Baru	50,000,000	44,165,000	88
	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	-	-	-
	Lanjutan pembangunan pagar kantor Metrologi	212,000,000	210,723,000	99
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	96,000,000	27,071,000	28
	Pengadaan Pakaian Korpri	48,000,000	27,071,000	56
	Pengadaan pakaian khusus	48,000,000	-	-
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,172,500,000	612,190,300	52
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	209,000,000	44,618,596	21
	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	78,500,000	-	-
	Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD	200,000,000	115,980,000	58



	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	200,000,000	138,700,000	69
	Bimbingan Teknis Manajemen Industri Bagi SDM Aparatur Pembina Industri	80,000,000	35,300,000	44
	Bimbingan Teknis Pengembangan, Pengelolaan dan Retribusi Pasar	90,000,000	63,805,000	71
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	315,000,000	213,786,704	68
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	366,350,000	241,069,600	66
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28,200,000	21,150,000	75
	Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Terhadap Pelaksanaan Program/Kegiatan	82,400,000	32,002,600	39
	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran OPD dan Forum OPD	100,250,000	75,868,500	76
	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD	34,200,000	22,200,000	65
	Revisi Renstra OPD 2017-2021	28,300,000	19,400,500	69
	Penyusunan Dokumen SPIP	34,200,000	16,950,000	50
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	21,000,000	17,935,000	85
	Pendampingan Penatausaha dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta Penvampaiannya	37,800,000	35,563,000	94
5.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1,789,850,000	1,027,673,304	57
	Peningkatan Pengawasan Pengelolaan Gudang dan Kegiatan Usaha Perdagangan	156,000,000	35,323,500	23
	Peningkatan Pengawasan dan Monitoring UTP dan BDKT di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir	200,000,000	153,519,000	77
	Pelayanan dan Pengembangan Kemetrolagian	855,350,000	663,323,804	78
	Pengembangan sarana informasi metrologi legal berbasis IT	100,000,000	98,450,000	98
	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Retribusi Tera/Tera Ulang dan Revisi Peraturan Bupati tentang UPTD Metrologi	100,000,000	12,157,000	12
	Pembinaan dan Penyuluhan Tertib Ukur	100,000,000	-	-
	Revitalisasi alat timbangan bagi pedagang pasar rakyat menuju pasar dan daerah tertib ukur	100,000,000	64,900,000	65
	Peningkatan pengawasan pupuk bersubsidi, LPG 3 Kg, B2 dan Minuman Beralkohol	178,500,000	-	-
	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	60,000,000	-	-
	Peningkatan keikutsertaan dalam perundingan sosekmalindo	60,000,000	-	-
6.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	295,200,000	-	-
	Pengembangan data base informasi potensi unggulan	150,000,000	-	-
	Pelatihan pengembangan produk ekspor bagi pelaku UKM	145,200,000	-	-
7.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	8,987,747,000	7,100,601,550	79
	Pembangunan Pasar Kecamatan	210,000,000	208,901,000	99
	Semenisasi Lapak Pedagang Pasar Sentral	200,000,000	198,276,000	99
	Semenisasi Halaman Parkir Pasar Sentral	200,000,000	198,419,000	99
	Pembangunan Los Pasar Desa Kep. Sungai Manasih	200,000,000	198,362,000	99
	revitalisasi parsial pasar rakyat yang rusak	1,200,000,000	758,553,950	63
	Revitalisasi Pasar Bintang (DAK)	2,115,157,000	2,016,926,100	95
	Pembangunan Lanjutan dan Revitalisasi Pasar Bangko Jaya (DAK)	1,100,000,000	1,041,188,800	95



Penyelesaian Pembayaran Semenisasi Lingkungan Pasar Rakyat Boltrem/Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	13,450,000		-
Revitalisasi Pasar Pujasera (Pusat Jajanan Serba Ada)/baru	150,000,000	141,712,500	94
Pendampingan TP4D/baru	100,000,000		-
Peningkatan Pengelolaan Pasar Rakyat	2,234,700,000	1,723,157,000	77
Monitoring dan Pengawasan Retribusi Pasar	138,790,000	137,830,500	99
Pemantauan dan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	377,950,000	101,089,000	27
Operasi Pasar	121,000,000	19,175,000	16
Pameran dagang dalam negeri	408,000,000	265,436,100	65
Penyelenggaraan Pasar Ramadhan	73,500,000	73,179,600	100
Misi dagang dan Lelang Komoditi	145,200,000	18,395,000	13
Program Pembinaan PedagangKaki Lima dan Asongan	50,000,000	-	-
Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan berupa (Gerobak PKL dan Tenda)	50,000,000	-	-
Program Pembinaan PedagangKaki Lima dan Asongan	90,000,000	86,709,500	96
Pengembangan pelayanan teknis kemasan	90,000,000	86,709,500	96
9. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	380,860,000	247,999,300	65
Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Kerajinan Tenun dan Tekat Dalam Upaya Memperkuat Klaster Industri	380,860,000	247,999,300	65
Penyusunan kebijakan dan rencana kerja pengembangan IKM	-	-	-
Penguatan kapasitas dan peran unit pendampingan lapangan IKM	-	-	-
			-
10. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	303,466,500	290,620,800	96
Pembinaan kemampuan teknologi industri pengolahan hasil perikanan	-	-	-
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Kerang Olahan	-	-	-
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Pengolahan Keladi Ungu	123,466,500	115,940,800	94
Pengadaan Mesin dan Peralatan IKM Batu Bata	180,000,000	174,680,000	97
Program Penataan StrukturIndustri	200,000,000	95,955,000	48
Penyusunan Masterplan Pembangunan Sentra IKM	200,000,000	95,955,000	48
Program PengembanganSentra-sentra Industri Potensial	244,000,000	233,066,000	96
Revitalisasi Sentra IKM Batu Bata	180,000,000	174,680,000	97
Pengembangan Data dan Informasi Industri Kecil dan Menengah	64,000,000	58,386,000	91
JUMLAH	25,946,803,066	20,098,462,120	77



Tabel diatas menunjukkan rincian program dan kegiatan selama satu tahun APBD 2019 dan sejauh mana persentase capaian realisasi selama tahun berjalan. Rincian diatas terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.296.879.566,- dan Belanja Langsung Rp. 19.649.923.500,- yang tertuang dalam 14 program dan 73 kegiatan dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 25.946.803.066,-.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu yang berisi visi, tujuan, sasaran dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Tahun 2016-2021 Kabupaten Rokan Hilir merupakan dokumen komprehensif berwawasan 5 (lima) tahun. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kabupaten Rokan Hilir untuk lima tahun ke depan.

Renstra itu sendiri memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan fokus utama pelayanan adalah pembangunan industri hulu dan industri hilir sektor non migas, pembangunan infrastruktur di perdesaan dan perkotaan, pengembangan kawasan sentra industri, pembangunan SDM yang berasaskan pada keimanan, berakhlak, dan berbudaya melayu, dan pembangunan sistem pemerintahan yang andal.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam membangun sektor industri dan perdagangan periode 2017 – 2021 seperti dibawah ini sebagaimana telah dirubah sesuai hasil evaluasi dan review Tim MenpanRB :

Tujuan 1 : Meningkatkan daya saing industri,

Sasaran : - Meningkatnya mutu produk industri

Indikator kinerja : - Persentase produk industri yang telah memenuhi standar kemasan (pelabelan)

- Meningkatnya produksi industri kreatif

Indikator kinerja : - Persentase pertumbuhan produksi industri kreatif

Tujuan 2 : Meningkatkan pemerataan industri melalui pembangunan sentra IKM,

Sasaran : - Terwujudnya sentra IKM yang berbasis potensi daerah

Indikator kinerja : - Jumlah sentra IKM

Tujuan 3 : Melaksanakan pembangunan sumber daya manusia industri melalui wirausaha,

Sasaran : - Meningkatnya jumlah wirausaha IKM



Indikator kinerja : - Persentase pertumbuhan wirausaha
IKM

Tujuan 4 : Meningkatkan kinerja ekspor yang berkualitas dan berkelanjutan,

Sasaran : - Meningkatnya Nilai Ekspor

Indikator kinerja : - Persentase nilai ekspor produk ke
LN

Tujuan 5 : Terwujudnya perdagangan yang berdaya saing dan kondusif,

Sasaran : - Meningkatnya usaha sektor perdagangan yang berkelanjutan
dan berkualitas

Indikator kinerja : - Persentase pertumbuhan jumlah
usaha dagang mikro, kecil,
menengah (UMKM) dan usaha
dagang besar

- Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana perdagangan

Indikator kinerja : - Persentase pasar rakyat yang
direvitalisasi/dibangun

- Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

Indikator kinerja : - Koefisien variasi harga barang
kebutuhan pokok dan barang
penting

- Meningkatnya perlindungan konsumen dan tertib niaga

Indikator kinerja : - % Jumlah UTTP bertanda tera sah
terhadap total UTTP

- Persentase pengawasan disektor
perdagangan

Tujuan 6 : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi

Sasaran : - Meningkatnya akuntabilitas organisasi

Indikator kinerja : - Hasil evaluasi SAKIP Disperindag

- Hasil Evaluasi SPIP Disperindag

- Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan



a. Strategi

Arah pembangunan industri dan perdagangan daerah yang berangkat dari formal kebijakan, yakni UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan tujuan dasar adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945. Tentunya, strategi yang dibangun untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2016 – 2021 harus dapat mengakomodir tujuan yang terkandung dalam undang – undang tersebut dengan segala kewenangan yang diberikan.

Strategi pembangunan industri dan perdagangan daerah yang dibangun mengacu pada misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang ditertuang dalam RPJPD 2005 – 2025. Misi Pertama, memajukan perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan agribisnis sebagai tulang punggungnya yang diwujudkan pada RPJMD II, yakni mengembangkan industri hulu dan industri hilir sebagai alternatif pengganti sumber pendapatan daerah sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Misi ini dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan pembangunan kawasan sentra industri untuk menggerakkan sektor – sektor ekonomi strategis dalam memperkuat struktur perekonomian daerah dan keseimbangan infrastruktur antar wilayah. Sasaran – sasaran yang ingin diwujudkan adalah :

- a) Terwujudnya kawasan industri strategis berbasis masyarakat pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan sesuai potensi wilayah; dan
- b) Terciptanya pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan baru untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian masyarakat.

Sesuai tugas dan fungsi pokoknya, maka peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir adalah meningkatkan aktivitas sektor industri dan perdagangan serta menjadikan sektor tersebut mampu sebagai alternatif sumber pendapatan daerah dan mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir dan sesuai dengan RPJMD 2017 – 2021, secara umum strategi yang ditempuh untuk meningkatkan aktivitas sektor industri dan perdagangan adalah sebagaimana dijelaskan berikut :

1. Memprioritaskan pembangunan industri berbasis peningkatan nilai komoditi lokal yang berdaya saing dengan memaksimalkan sumber daya yang ada;
2. Mempercepat penyebaran industri di wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan kawasan sentra industri;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya industri;
4. Mengembangkan industri prioritas yang mampu memanfaatkan tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2016;



5. Mengoptimalkan perdagangan luar negeri;
6. Meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri yang lebih efisien;
7. Pembenahan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur;
8. Pembenahan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang lebih transparan, akuntabel dan bersih.

b. Arah Kebijakan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017 – 2021 telah menetapkan misi pembangunan daerah yang terkait langsung dengan sektor industri yaitu, mengembangkan industri hulu dan industri hilir sebagai alternatif pengganti sumber pendapatan daerah sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Sedangkan, sektor perdagangan dikembangkan untuk memperkuat kluster industri dan mendukung tumbuhnya kawasan sentra industri yang berkualitas sehingga sektor industri dan perdagangan dapat menjadi pilar perekonomian daerah yang efisien serta dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan industri dan perdagangan daerah ke depan secara konsisten mengacu pada arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2017 – 2021, serta tetap menyelaraskannya dengan arah pembangunan industri dan perdagangan nasional. Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun langkah – langkah strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Arah kebijakan pembangunan industri dan perdagangan ke depan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan aktivitas industri berbasis peningkatan nilai tambah komoditi lokal yang andal dan unggul;
2. Prioritas peningkatan jumlah industri berbasis ekspor guna mendongkrak kinerja ekspor non migas Kabupaten Rokan Hilir;
3. Percepatan penyebaran industri berbasis kawasan dan potensi wilayah agar pembangunan industri berjalan secara efektif;
4. Pemberian fasilitasi penyediaan sarana informasi pasar ekspor, promosi dan pemasaran produk secara intensif dan optimal;
5. Peningkatan aksi edukasi terkait peluang ekspor bagi pelaku UMKM secara berkesinambungan;
6. Meningkatkan aksi tertib ukur dan tertib niaga dalam upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
7. Peningkatan kegiatan promosi dagang di dalam negeri agar dapat menaikkan citra produk UMKM, memperkenalkan identitas produk UMKM kepada pasar baru, sekaligus mengharapkan adanya transaksi business to business;



8. meningkatkan efisiensi sistem distribusi dan logistik serta menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
9. Peningkatan ketersediaan informasi harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting secara real time dan menyeluruh;
10. Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha perdagangan;
11. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan serta fasilitasi penyediaan sarana usaha perdagangan bagi pedagang UMKM;
12. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pembina industri dan perdagangan;
13. Peningkatan kompetensi tenaga kerja industri;
14. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan manajerial tata kelola usaha pelaku UMKM;
15. Memperkuat peranan dukungan kinerja layanan OPD secara optimal; dan
16. Meningkatkan implementasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang transparan, akuntabel dan bersih secara berkelanjutan dan berkomitmen

Berdasarkan keenam belas arah kebijakan tersebut di atas, langkah – langkah strategis yang perlu diambil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir selama kurun waktu 2017 – 2021 terkait dukungan pembangunan industri dan perdagangan adalah

1. Peningkatan aktivitas industri berbasis peningkatan nilai tambah komoditi lokal yang andal dan unggul dilakukan dengan langkah strategis, yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas industri berbasis pengolahan komoditi lokal daerah untuk menciptakan nilai tambah komoditi tersebut melalui
 - a. Peningkatan penggunaan teknologi industri yang tepat dan efisien pada Industri Kecil dan Menengah;
 - b. Pemberian keterampilan baru terhadap calon wirausaha IKM dalam upaya pengembangan produk;
 - c. Peningkatan investasi industri dengan menyediakan tempat untuk dibangun sarana dan prasarana industri;
 - d. Peningkatan kemampuan teknis sumber daya manusia pembina industri dan tenaga kerja industri; dan
 - e. Pengembangan IKM dengan pemberian fasilitas dan insentif
2. Mendorong tumbuhnya industri berbasis ekspor dilakukan dengan langkah :
 - a. Peningkatan kualitas produk industri dengan intensifikasi penerapan standar mutu produk; dan
 - b. Pemberian fasilitas yang tepat dan berguna dalam upaya mendorong industri dapat membuka akses pasar ekspor.
3. Mengembangkan kawasan sentra industri strategis berbasis potensi dilakukan dengan langkah :



- a. Pembangunan 4 (empat) sentra industri kecil dan menengah, yakni Sentra IKM Pengolahan Hasil Perikanan; Sentra IKM Padi/Beras; Sentra IKM Pengolahan Nenas; dan Sentra IKM Hasil Sektor Ekonomi Lainnya;
 - b. Peningkatan efektifitas kajian pengembangan kawasan sentra industri yang memiliki potensi untuk dibangun; dan
 - c. Peningkatan kuantitas infrastruktur kawasan sentra industri seperti rumah kemasan, outlet produk, unit pelayanan teknis
4. Meningkatkan fasilitasi penyediaan sistem informasi pasar ekspor, promosi dan pemasaran produk unggulan dilakukan dengan langkah meningkatkan fasilitasi penyediaan sistem informasi pasar ekspor, promosi dan pemasaran produk unggulan melalui
- a. Intensifikasi promosi dagang di pasar internasional;
 - b. Penyediaan sarana informasi pasar ekspor bagi pelaku usaha lokal; dan
 - c. Pemberian bantuan pemasaran produk di pasar internasional
5. Meningkatkan pemahaman eksportir/calon eksportir terhadap peluang ekspor dilakukan dengan langkah strategis :
- a. Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur ekspor impor; dan
 - b. Pelatihan bagi pelaku UMKM untuk menjadi eksportir
6. Penguatan aksi perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan secara optimal, berkesinambungan, dan koordinatif dilakukan dengan langkah :
- a. Peningkatan efektifitas pengawasan seperti pengawasan UTTP dan BDKT, gudang dan kegiatan usaha perdagangan, dan barang yang diatur tata niaganya; dan
 - b. Peningkatan jumlah UTTP yang bertanda tera sah berlaku dan pelaksanaan tertib ukur.
7. Memperkuat peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir dalam upaya memfasilitasi pencitraan produk UMKM unggulan dilakukan dengan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pameran dagang dengan cara aktif mengikuti kegiatan pameran/expo yang diselenggarakan pihak lain di dalam negeri.
8. Meningkatkan efisiensi dan kelancaran distribusi serta ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dilakukan dengan langkah :
- a. menjaga dan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting; dan
 - b. peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya kelancaran distribusi dan peningkatan ketersediaan barang kebutuhan pokok
9. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dilakukan dengan langkah :



- a. pemantauan harga barang kebutuhan pokok di pasar secara rutin;
 - b. Pemantauan dan pengawasan stok barang kebutuhan pokok di pasar dan di gudang secara rutin
10. Meningkatkan fasilitasi dan kondusifitas iklim usaha perdagangan dilakukan dengan langkah strategis :
- a. Kemudahan perizinan dan penyederhanaan prosedur membuka usaha perdagangan, yang diperkuat dengan regulasi;
 - b. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - c. Misi dagang dan pasar lelang
11. Memperkuat sarana perdagangan dalam upaya kelancaran distribusi dan logistik dilakukan dengan langkah strategis :
- a. Pembangunan/Revitalisasi pasar rakyat berbasis SNI; dan
 - b. Peningkatan sarana usaha perdagangan bagi pedagang kaki lima/pedagang pasar rakyat dengan menyediakan bantuan sarana dagang secara layak seperti gerobak, tenda, coolbox, dan sarana untuk pedagang keliling.
12. Peningkatan pemahaman dan keterampilan teknis SDM Pembina Industri dan Perdagangan dilakukan dengan langkah strategis
- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal; dan
 - b. Bimbingan teknis industri dan perdagangan bagi aparatur.
13. Peningkatan pemahaman dan keterampilan teknis tenaga kerja industri melalui pelatihan dan bimbingan teknis industri;

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sesuai arahan dari tim Menpan RB mengenai hasil evaluasi dan review terhadap RENSTRA Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir, maka Indikator Kinerja Sasaran yang semula berjumlah 18 ditahun 2018, berkurang menjadi 13 indikator kinerja. Dan dari seluruh indikator kinerja sasaran, yang dijadikan Indikator Kinerja Utama ada 10 indikator.

Adapun IKU Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar
Kabupaten Rokan Hilir



No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatkan Daya Saing Industri	<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya mutu produk industriMeningkatnya produksi industri kreatif	<ul style="list-style-type: none">Persentase produk industri yang telah memenuhi standar kemasan (pelabelan)Persentase pertumbuhan produksi industri kreatif
2	Meningkatkan pemerataan industri melalui pembangunan sentra IKM	<ul style="list-style-type: none">Terwujudnya sentra IKM yang berbasis potensi daerah	<ul style="list-style-type: none">Jumlah sentra IKM
3	Melaksanakan pembangunan sumber daya manusia industri melalui wirausaha	<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya jumlah wirausaha IKM	<ul style="list-style-type: none">Persentase pertumbuhan wirausaha IKM
4	Meningkatkan kinerja ekspor yang berkualitas dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya nilai ekspor	<ul style="list-style-type: none">Persentase nilai ekspor produk ke LN
5	Terwujudnya perdagangan yang berdaya saing dan kondusif	<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya usaha sektor perdagangan yang berkelanjutan dan berkualitasMeningkatnya kuantitas dan kualitas sarana perdagangan	<ul style="list-style-type: none">Persentase pertumbuhan jumlah usaha dagang mikro, kecil, menengah (UMKM) dan usaha dagang besarPersentase pasar rakyat yang direvitalisasi/dibangun

		<ul style="list-style-type: none"> • Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting • Meningkatnya perlindungan konsumen dan tertib niaga 	<ul style="list-style-type: none"> • Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting • Persentase Jumlah UTTP bertanda tera sah terhadap total UTTP • Persentase pengawasan disektor perdagangan
--	--	--	---

2.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya.

Sehubungan dengan adanya perubahan pada Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar yang disesuaikan dengan hasil evaluasi dan review pada konten Renstra dinas dimana berkorelasi dengan IKU, maka penyajian Rencana Kinerja Tahunan sedikit berbeda pada uraian tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran sebagaimana disebutkan diatas. Berikut ini adalah Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019.

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	Meningkatnya mutu produk industri	<ul style="list-style-type: none">Persentase produk industri yang telah memenuhi standar kemasan (pelabelan)	2%
2	Meningkatnya produksi industri kreatif	<ul style="list-style-type: none">Persentase pertumbuhan produksi industri kreatif	3%
3	Terwujudnya sentra IKM yang berbasis potensi daerah	<ul style="list-style-type: none">Jumlah sentra IKM	2
4	Meningkatnya jumlah wirausaha IKM	Persentase pertumbuhan wirausaha IKM	1,6%
5	Meningkatnya nilai ekspor	Persentase nilai ekspor produk ke LN	1,5%
6	Meningkatnya usaha sektor perdagangan yang berkelanjutan dan berkualitas	<ul style="list-style-type: none">Persentase pertumbuhan jumlah usaha dagang mikro, kecil, menengah (UMKM) dan usaha dagang besar	3.2%
7	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana perdagangan	Persentase pasar rakyat yang direvitalisasi/dibangun	5.0
8	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	<9



9	Meningkatnya perlindungan konsumen dan tertib niaga	<ul style="list-style-type: none"> • % Jumlah UTTP bertanda tera sah terhadap total UTTP • Persentase pengawasan disektor perdagangan 	<p>23%</p> <p>5%</p>
11	Meningkatnya pengelolaan keuangan kinerja organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Evaluasi SAKIP Disperindag • Hasil Evaluasi SPIP Disperindag • Nilai Reformasi Birokrasi Disperindag 	<p>B</p> <p>Level 3</p> <p>C</p>

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan hal sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja yang dilakukan instansi dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah sesuai pilihan prioritas. Perjanjian kinerja tahunan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengetahui apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur besaran capaian target yang ditetapkan.

Perjanjian kinerja tahunan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir disusun mengacu kepada Renstra OPD tahun 2016-2021 yang tertuang didalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Beserta Indikator Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dengan berdasar pada program



pembangunan daerah sebagaimana tertera dalam RPJMD 2016-2021. Ini berarti indikator kinerja kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, dimana terdapat perbedaan terhadap penyajian Rencana Kinerja Tahunan, maka pada Perjanjian Kinerja juga mengalami hal yang sama terhadap penyajiannya karena Perjanjian Kinerja merupakan bentuk komitmen dari pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahunan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	Meningkatnya mutu produk industri	• Persentase produk industri yang telah memenuhi standar kemasan (pelabelan)	2%
2	Meningkatnya produksi industri kreatif	• Persentase pertumbuhan produksi industri kreatif	3%
3	Terwujudnya sentra IKM yang berbasis potensi daerah	• Jumlah sentra IKM	2
4	Meningkatnya jumlah wirausaha IKM	Persentase pertumbuhan wirausaha IKM	1,6%
5	Meningkatnya nilai ekspor	Persentase nilai ekspor produk ke LN	1,5%



6	Meningkatnya usaha sektor perdagangan yang berkelanjutan dan berkualitas	<ul style="list-style-type: none">Persentase pertumbuhan jumlah usaha dagang mikro, kecil, menengah (UMKM) dan usaha dagang besar	3.2%
7	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana perdagangan	Persentase pasar rakyat yang direvitalisasi/dibangun	5.0
8	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	<9
9	Meningkatnya perlindungan konsumen dan tertib niaga	<ul style="list-style-type: none">% Jumlah UTTP bertanda tera sah terhadap total UTTPPersentase pengawasan disektor perdagangan	23% 5%
11	Meningkatnya pengelolaan keuangan kinerja organisasi	<ul style="list-style-type: none">Nilai Evaluasi SAKIP DisperindagHasil Evaluasi SPIP DisperindagNilai Reformasi Birokrasi Disperindag	B Level 3 C

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

capaian kinerja diperoleh berdasarkan atas pengukuran indikator kinerja. Pada beberapa indikator kinerja semakin tinggi realisasi menggambarkan tingkat pencapaian rencana yang semakin baik. Adapun cara pengukurannya adalah:

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Semua indikator kinerja yang digunakan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar menggunakan pengukuran ini. Sedangkan predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/Sesuai Target	
>100%	Melebihi Target	

Sedangkan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Predikat Nilai Capaian Kinerja < 100%

No	Kategori	Rata-rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	>90	
2	Baik	75 – 89,99	
3	Cukup	65,00 – 74,99	
4	Kurang	50,00 – 64,99	



5	Sangat Kurang	0 – 49,99	
---	---------------	-----------	--

3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar.

Hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Pedikat
Persentase produk industri yang telah memenuhi standar kemasan (pelabelan)	2%	2.03%	101.5%	Melebihi target
Persentase pertumbuhan produksi industri kreatif	3%	7.69%	256.3%	Melebihi target
Jumlah sentra IKM	2	0	0%	Tidak Tercapai
Persentase pertumbuhan wirausaha IKM	1.6%	12.55%	784.4%	Melebihi target
Persentase nilai ekspor produk ke LN	1,5%	0	33.3%	Tidak Tercapai
Persentase pertumbuhan jumlah usaha dagang mikro, kecil, menengah (UMKM) dan usaha dagang besar	3.2%	0	0%	Tidak Tercapai
Persentase pasar rakyat yang direvitalisasi/dibangun	5%	25%	500%	Melebihi target



Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	<9	<9	100%	Tercapai/sesuai target
% Jumlah UTTP bertanda tera sah terhadap total UTTP	23%	21%	91.3%	Tidak Tercapai
Persentase pengawasan disektor perdagangan	5%	0	0%	Tidak Tercapai

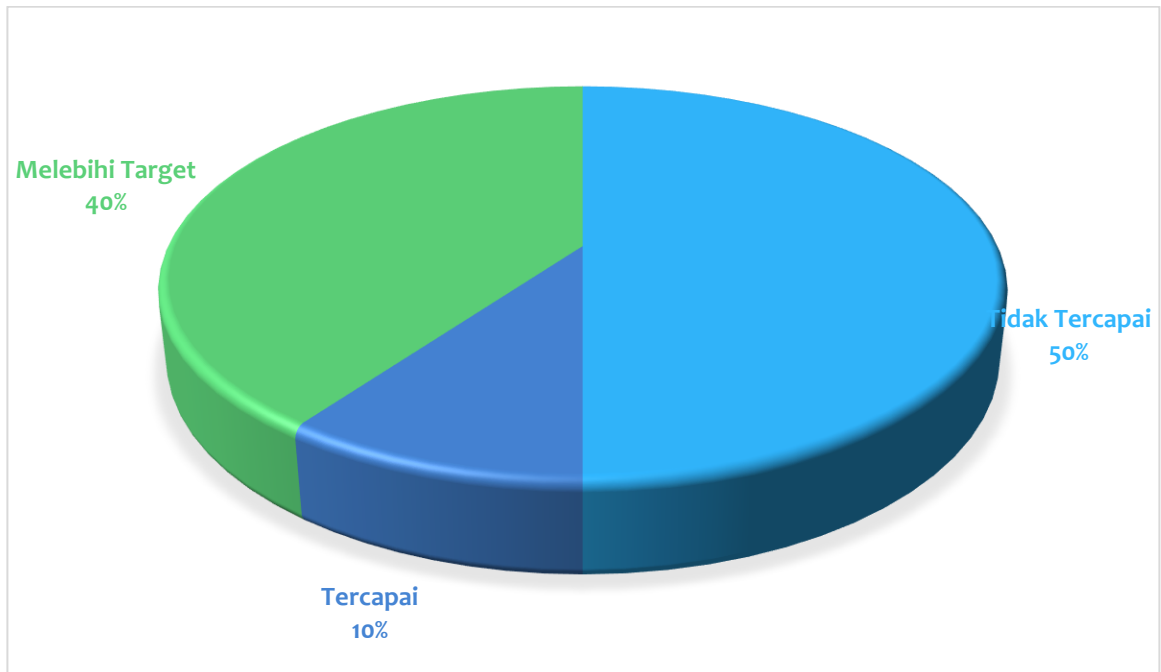
Selanjutnya akan kami sajikan predikat capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama yang telah diukur persentasenya pada uraian sebagaimana tersebut diatas seperti terlihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 3.4
Predikat Capaian Kinerja

NO	URAIAN	JUMLAH INDIKATOR	%
1	Tidak tercapai	5 indikator	50%
2	Tercapai/sesuai target	1 indikator	10%
3	Melebihi target	4 indikator	40%
	Total		

Grafik 3.1

Capaian IKU Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019



Berikut ini adalah data perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 dengan tahun 2019. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa IKU tahun 2019 kembali mengalami perubahan sesuai dengan hasil evaluasi dan review dari Tim Kemenpan RB, maka penyajian capaiannya telah disesuaikan sebagaimana mestinya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 dan 2019

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2018	Capaian 2019
Persentase jumlah industri yang memperoleh sertifikat mutu produk (Halal, GMP, HACCP, SNI/ISO, P-IRT, HKI)	35%	Tidak lagi menjadi indikator
Persentase produk industri yang telah memenuhi standar kemasan (pelabelan)	123%	101.5%
Persentase pertumbuhan produksi industri kreatif	52%	256.3%



Jumlah sentra IKM	0%	0%
Persentase pertumbuhan wirausaha IKM	46,9%	784.4%
Persentase kenaikan jumlah pelaku eksportir	0%	Tidak lagi menjadi indikator
Persentase bertambahnya pasar tujuan ekspor	0%	Tidak lagi menjadi indikator
Persentase nilai ekspor produk ke LN	0%	33.3%
Persentase pertumbuhan jumlah usaha dagang mikro, kecil, menengah (UMKM) dan usaha dagang besar	0%	0%
Jumlah pasar tipe A	0%	Tidak lagi menjadi indikator
Jumlah pasar tipe B	0%	Tidak lagi menjadi indikator
Jumlah pasar tipe C	0%	Tidak lagi menjadi indikator
Jumlah pasar tipe D	0%	Tidak lagi menjadi indikator
Persentase pasar rakyat yang direvitalisasi/dibangun	Belum menjadi indikator	500%
Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100%	100%
% Jumlah UTTP bertanda tera sah terhadap total UTTP	150%	91.3%
Jumlah pelanggaran di sektor perdagangan	80%	Tidak lagi menjadi indikator



Persentase pengawasan disektor perdagangan	Belum menjadi indikator	0%
--	-------------------------	----

Bila kita analisa antara capaian tahun 2018 dan 2019 terdapat beberapa angka yang mencolok pada tiga indikator yang menunjukkan tingkat capaian yang sangat signifikan. *Indikator yang pertama* adalah Persentase Pertumbuhan Produksi Industri Kreatif dengan capaian sebesar 256,3% dimana pada tahun sebelumnya hanya berkisar pada angka 52%. Pada tahun 2018 pertumbuhan Produksi Industri Kreatif didominasi oleh hasil produksi kearifan lokal dengan ditandai oleh banyaknya rumah-rumah produksi yang menghasilkan kerajinan khas melayu seperti songket, tanjak, dan tepak, berbeda halnya dengan produksi pada tahun 2019 dimana produksi industri kreatif lebih bersifat pemberdayaan hasil sumber daya alam yang ada khususnya produksi industri kreatif berbahan limbah sawit. Hasil dari produksi industri berbahan limbah sawit ini diantaranya adalah tas lidi sawit, tempat tisu dari lidi sawit, hiasan dinding dari lidi sawit, dan kotak perhiasan dari lidi sawit. Produksi industri berbahan lidi sawit ini sangat diterima oleh pasaran lokal, bahkan telah diekspor kenegara tetangga, Malaysia dan telah masuk ke outlet-outlet ternama di Malaka. Produksi andalan lainnya tahun 2019 adalah batik tulis. Untuk batik tulis sendiri mengambil tema ciri khas Rokan Hilir dengan tema ikan dan juga dedauan. Dari segi pemasaran, batik tulis Bagansiapiapi juga telah dipasarkan diberbagai tempat dan juga selalu menjadi andalan pada pameran-pameran dan juga expo tiap tahunnya.

Indikator selanjutnya yang mengalami kenaikan capaian yang signifikan adalah Pertumbuhan Wirausaha baru dengan angka capaian 784.4%. Apabila ditilik kebelakang faktor utama kenaikan wirausaha baru ini bisa dikarenakan faktor semakin tingginya tingkat pengangguran, dimana pada tahun 2019 telah terjadi pemutusan kontrak terhadap tenaga honorer secara besar-besaran pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Dampak dari pemutusan kontrak ini maka angka pengangguran semakin bertambah. Cara bertahan yang paling mudah dari kondisi tersebut adalah dengan membuka usaha sebagai wirausaha baru dikarenakan tidak begitu membutuhkan modal yang besar. Dengan jumlah total IKM pada tahun 2018 sebesar 1036 IKM, tercatat kenaikan wirausaha baru sebanyak 130 IKM dengan spesifikasi IKM yang bergerak dibidang makanan sebanyak 89 IKM, dibidang minuman sebanyak 1 IKM dan IKM Batu Bata sebanyak 40 IKM.

Indikator yang ketiga adalah Persentase Pasar Rakyat yang dibangun dengan capaian sebesar 500%. Ketersediaan dana yang memadai merupakan faktor yang penting sebagai barometer terlaksananya kegiatan, sehingga apabila kegiatan dapat berjalan dengan maka target dari sebuah indikator dapat tercapai sesuai dengan yang ditetapkan.



Pada tahun 2019 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar telah melakukan revitalisasi terhadap 13 unit pasar dan pembangunan baru terhadap 2 unit pasar. Dari target yang ditetapkan sebanyak 5% untuk tahun 2019, diluar perencanaan ternyata dapat terealisasi sebesar 25%.

Dengan adanya evaluasi yang kedua oleh Tim Menpan RB beberapa waktu lalu, maka ada beberapa indikator yang dinilai masih belum bisa dikategorikan sesuai, sehingga harus diganti. Diantaranya adalah Persentase jumlah industri yang memperoleh sertifikat mutu produk (Halal, GMP, HACCP, SNI/ISO, P-IRT, HKI), Persentase bertambahnya pasar tujuan ekspor, Jumlah pasar tipe A, B, C, dan D kemudian Jumlah pelanggaran di sektor perdagangan.

3.3. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Sesuai dengan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, dimana Dinas Peindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir memiliki kontribusi untuk mewujudkan misi ke dua, yaitu Mengembangkan industr hulu dan hilir sebagai alternatif pengganti sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam mendukung pencapaian visi misi Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan program-program selama kurun waktu 2016-2021.

Pencapaian indikator kinerja Sasaran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2019

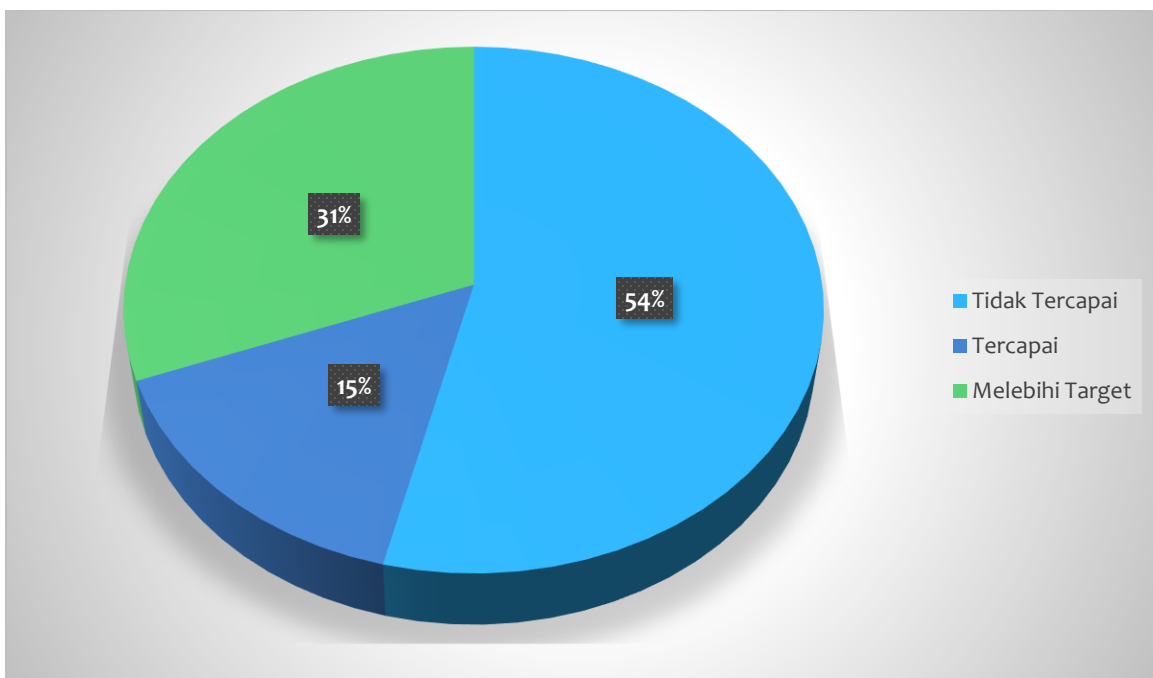


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya mutu produk industri	1. Persentase produk industri yang telah memenuhi standar kemasan (pelabelan)	2%	2,03%	101.5%
Meningkatnya produksi industri kreatif	Persentase pertumbuhan produksi industri kreatif	3%	7.69%	256.3%
Terwujudnya sentra IKM yang berbasis potensi daerah	Jumlah sentra IKM	1	0	0%
Meningkatnya jumlah wirausaha IKM	Persentase pertumbuhan wirausaha IKM	1.6%	12.55%	784.4%
Meningkatnya nilai ekspor	Persentase kenaikan nilai ekspor produk ke LN	1,5%	0.5%	33.3%
Meningkatnya usaha sektor perdagangan yang berkelanjutan dan berkualitas	Persentase pertumbuhan jumlah usaha dagang mikro, kecil, menengah (UMKM) dan usaha dagang besar	3.2%	0%	0%
Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana perdagangan	Persentase pasar rakyat yang direvitalisasi / dibangun	5%	25%	500%
Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	<9	<9	100%
Meningkatnya perlindungan konsumen dan tertib niaga	1. % Jumlah UTTP bertanda tera sah terhadap total UTTP	23%	21%	91.3%
	1. % Pengawasan disektor perdagangan	5%	0%	0%

Meningkatnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai evaluasi SAKIP Disperindag	B	B	100%
	2. Level Maturitas SPIP Disperindag	Level 3	n/a	0%

Grafik3.2

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018



3.4. EVALUASI KINERJA SASARAN STRATEGIS

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran kinerja, akan tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Penilaian atas pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar dapat dari pencapaian nilai akhir kinerja masing-masing sasaran sebagaimana penjelasan berikut ini :

1. Meningkatnya mutu produk industri

Capaian kinerja sasaran dari meningkatnya mutu produk industri diukur melalui indikator kinerja "Persentase produk industri yang telah memenuhi standar kemasan



(pelabelan)” dengan didukung oleh satu kegiatan yaitu Pengembangan Pelayanan Teknis Kemasan dengan besar anggaran Rp.90.000.000,- dengan realisasi keuangan mencapai 96%. Adapun besaran capaian untuk indikator ini adalah sebesar 101,5% atau bisa dibilang melebihi target yang telah ditetapkan, meskipun sedikit menurun dari capaian tahun 2018 dimana angka capaian berkisar pada 123%. Akan tetapi hal tersebut tidak begitu mempengaruhi karena capaian pada tahun 2019 tetap sesuai dengan target yang telah ditetapkan bahkan cenderung melebihi.

Dukungan anggaran yang memadai serta terlaksananya kegiatan secara maksimal merupakan faktor utama sehingga target capaian indikator kinerja sasaran dapat tercapai dengan baik. Dimana masyarakat memang sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini sehingga lebih memotivasi IKM yang ada untuk lebih berbenah diri untuk memenuhi standar kemasana (pelabelan) agar produk yang dihasilkan lebih berkualitas dan sesuai SNI.

Selain itu, hal yang mendasari tercapainya target ini adalah semakin meningkatnya kontribusi lembaga/stakeholder lainnya dalam membina SDM industri melalui pelatihan, bantuan desain kemasan dan sosialisasi pelabelan produk. Hal ini dapat kita lihat pada UPT Kemasan Provinsi Riau yang ikut andil dalam pemberian bantuan desain kemasan kepada IKM Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu pelaku IKM sudah mulai sadar begitu pentingnya kualitas kemasan dalam menghadapi kompetisi dan menjadi mutlak untuk memasuki pasar modern.

Akan tetapi, tidak dipungkiri bahwa tidak semua IKM yang sadar akan pentingnya kualitas dari produksi yang dihasilkan khususnya dari segi standar kemasan ini. Hal ini disebabkan masih belum siapnya para pelaku industry untuk bersaing dari segi harga, karena apabila suatu produk telah memenuhi standar kemasan maka secara otomatis harga jual juga akan naik seiring dengan biaya operasional yang telah dikeluarkan. Maka dari itu masih banyak pelaku industry khususnya IKM yang masih enggan untuk beralih menggunakan kemasan standar tersebut.

Untuk meminimalisir hal tersebut maka Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar berupaya untuk melakukan sosialisasi baik itu dengan instansi terkait maupun stake holder guna memberikan pemahaman bagi pelaku industri tentang pentingnya kemasan dan pelabelan bagi produk IKM, dimana selain meningkatkan daya saing juga untuk ketahanan daya simpan produk IKM itu sendiri.

Tabel 3.7

Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Mutu Produk Industri



Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat
Persentase produk industri yang telah memenuhi standar kemasan (pelabelan)	2%	2,03%	101%	Melebihi target

2. Meningkatnya produksi industri kreatif

Capaian kinerja sasaran dari meningkatnya produksi industri kreatif diukur melalui indikator persentase pertumbuhan produksi industri kreatif dengan didukung program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui kegiatan “Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Kerajinan Tenun dan Tekat dalam Upaya Memperkuat Klaster Industri” dengan jumlah anggaran Rp.380.860.000,- dan terealisasi sebesar Rp.247.999.300,-.

Indikator Persentase Pertumbuhan Produksi Industri Kreatif memiliki capaian sebesar 256,3% dimana pada tahun sebelumnya hanya berkisar pada angka 52%. Pada tahun 2018 pertumbuhan Produksi Industri Kreatif didominasi oleh hasil produksi kearifan lokal dengan ditandai oleh banyaknya rumah-rumah produksi yang menghasilkan kerajinan khas melayu seperti songket, tanjak, dan tepak, berbeda halnya dengan produksi pada tahun 2019 dimana produksi industri kreatif lebih bersifat pemberdayaan hasil sumber daya alam yang ada khususnya produksi industri kreatif berbahan limbah sawit. Hasil dari produksi industri berbahan limbah sawit ini diantaranya adalah tas lidi sawit, tempat tisu dari lidi sawit, hiasan dinding dari lidi sawit, dan kotak perhiasan dari lidi sawit. Produksi industri berbahan lidi sawit ini sangat diterima oleh pasaran lokal, bahkan telah diekspor kenegara tetangga, Malaysia dan telah masuk ke outlet-outlet ternama di Malaka. Produksi andalan lainnya tahun 2019 adalah batik tulis. Untuk batik tulis sendiri mengambil tema ciri khas Rokan Hilir dengan tema ikan dan juga dedauan. Dari segi pemasaran, batik tulis Bagansiapiapi juga telah dipasarkan diberbagai tempat dan juga selalu menjadi andalan pada pameran-pameran dan juga expo tiap tahunnya.

Apabila dilihat dari capaian tahun 2018 dimana terdapat capaian sebesar 52%, keadaan ini sangat jauh berbeda dengan capaian pada tahun 2019 dimana terdapat peningkatan dengan selisih 204.3% atau bisa dikatakan terjadi peningkatan hamper 5 kali lipat dari tahun sebelumnya. Faktor yang paling utama teridentifikasi mempengaruhi hal tersebut adalah bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir telah memiliki beberapa IKM binaan yang bergerak dibidang industri kreatif seperti tenun, tekat, tas rajut dan juga tanjak. IKM binaan ini terus dilakukan



pendampingan sehingga dapat memperbaiki kualitas dan juga kuantitas hasil produksi dengan ditandai dengan berhasilnya memasuki pasaran ekspor untuk negara tetangga.

Namun meskipun perkembangan industri kreatif Rokan Hilir kini telah menunjukkan arah perkembangan yang lebih baik, namun tidak dipungkiri bahwa masih saja ada faktor penghambat dilapangan yang harus di segara diminimalisir sehingga perkembangan industri kreatif ini dapat berkembang dengan lebih maksimal lagi. Diantara faktor penghambat tersebut adalah masih minimnya pelaku industri yang bergerak dibidang industri kreatif ini. Selama ini industri kreatif yang ada masih dibawah bimbingan, pendampingan dan *distimulasi* oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar.

Dengan masih minimnya pelaku industri yang bergerak dibidang industri kreatif itu sendiri maka pertumbuhan untuk industri ini bisa dibilang masih tergolong cukup rendah meskipun ada peningkatan yang signifikan ditahun ini.

Untuk itu menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk bisa lebih menggali dan berupaya bagaimana caranya agar industri kreatif ini dapat lebih berkembang pesat kedepannya melalui pemanfaatan kreatifitas, keterampilan serta bakat individu seputar industri kreatif yang dikendalikan oleh hukum kekayaan intelektual, seperti misalnya paten, hak cipta, merek, royalti dan desain.

Tabel 3.8

Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Produksi Industri Kreatif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat
Persentase pertumbuhan produksi industri kreatif	3%	7,69%	256,5%	Melebihi target

3. Terwujudnya sentra IKM yang berbasis potensi Daerah

Capaian kinerja sasaran dari Terwujudnya sentra IKM yang berbasis potensi Daerah diukur melalui indikator Jumlah sentra IKM dengan target ditahun 2019 sudah terdapat 2 unit sentra IKM. Namun target yang telah ditetapkan belum bisa terealisasi dimana capaian pada tahun ini sama dengan capaian pada tahun sebelumnya, yaitu tidak tercapai, atau bisa dikatakan belum ada satupun sentra industri yang terbangun.

Indikator kinerja sasaran ini didukung oleh dua program teknis yaitu Program Penataan Struktur Industri dengan kegiatan "Penyusunan Masterplan Pembangunan



Sentra IKM” dan Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial dengan dua kegiatan yaitu “Revitalisasi Sentra IKM Batu Bata” dan juga “Pengembangan Data dan Informasi Industri Kecil dan Menengah”. Seluruh kegiatan ini berjalan dengan realisasi anggaran hampir 80%.

Apabila dianalisa, memang pembangunan sentra IKM ini tidak mudah, meskipun didukung oleh Sumber Daya Alam yang melimpah dari hasil perikanan, pertanian, dan perkebunan, namun masih banyak faktor dan persyaratan yang harus dipenuhi seperti sudah tersedianya lokasi yang *clean* dan *clear* sehingga pembangunan baru bisa dilakukan. Karena salah satu faktor penghambat dari pembangunan sentra IKM ini adalah belum adanya lahan hibah yang strategis untuk pembangunan sentra IKM itu sendiri.

Selain itu Masterplan merupakan hal yang juga harus diperhatikan sebelum membangun unit sentra IKM ini. Sesuai perencanaan, penyusunan masterplan ini telah direncanakan dilakukan pada tahun pertama RENSTRA atau tahun 2017. Namun dikarenakan anggaran yang tidak memadai maka penyusunan masterplan tidak dapat dilakukan sampai dengan tahun 2018. Dikarenakan penyusunan masterplan ini baru dapat terealisasi pada tahun 2019 maka pembangunan dari sentra industri ini sendiri diperkirakan baru bisa dapat terlaksana pada tahun 2020 dengan prioritas utama adalah penentuan lahan atau lokasi yang sudah *clean* dan *clear*.

Tabel 3.9

Realisasi Indikator Sasaran Terwujudnya sentra IKM yang berbasis potensi Daerah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat
Jumlah sentra IKM	2	0%	0%	Sangat Kurang

4. Meningkatnya jumlah wirausaha IKM

Capaian kinerja sasaran dari meningkatnya jumlah wirausaha IKM diukur melalui indikator persentase pertumbuhan wirausaha IKM dengan target 1,6% dengan realisasi 12.55% atau setara dengan capaian 784.4%.

Indikator ini didukung oleh Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dengan jumlah 4 kegiatan, dimana total anggaran sebesar Rp.303.466.500,- dengan realisasi kurang lebih 90%. Selain itu program yang mendukung indikator ini adalah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan jumlah dua kegiatan. Namun kedua kegiatan pada program ini terpaksa dimatikan karena terjadi rasionalisasi anggaran pada perubahan anggaran tahun 2019.



Dengan hanya didukung oleh dua kegiatan sebagai pendongkrak capaian, maka indikator ini dapat dikategorikan indikator dengan capaian yang cukup signifikan dimana dengan target 1,6% terealisasi sebesar 12,55% atau setara dengan capaian 784,4%. Hal ini merupakan capaian yang cukup menggembirakan dimana dengan hanya didukung oleh dua kegiatan namun tidak mempengaruhi capaian indikator sasarannya, bahkan bisa melebihi apa yang sudah ditargetkan.

Apabila ditilik kebelakang faktor utama kenaikan wirausaha baru ini bisa dikarenakan faktor semakin tingginya tingkat pengangguran, dimana pada tahun 2019 telah terjadi pemutusan kontrak terhadap tenaga honorer secara besar-besaran pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Dampak dari pemutusan kontrak ini maka angka pengangguran semakin bertambah. Cara bertahan yang paling mudah dari kondisi tersebut adalah dengan membuka usaha sebagai wirausaha baru dikarenakan tidak begitu membutuhkan modal yang besar. Hal ini dapat dilihat dengan Banyak wirausaha baru yang tumbuh dikalangan pemuda. Dengan jumlah total IKM pada tahun 2018 sebesar 1036 IKM, tercatat kenaikan wirausaha baru sebanyak 130 IKM dengan spesifikasi IKM yang bergerak dibidang makanan sebanyak 89 IKM, dibidang minuman sebanyak 1 IKM dan IKM Batu Bata sebanyak 40 IKM.

Faktor penghambat untuk pencapaian indikator ini sebenarnya adalah akses permodalan dan pemasaran yang dirasa cukup sulit oleh pelaku industri, sehingga membuat pelaku IKM enggan untuk meneruskan usaha mereka. Dinas Perindustrian yang memiliki kewenangan dibidang Perindustrian maka telah berupaya untuk membantu pelaku IKM mempermudah mendapatkan akses permodalan melalui bantuan mesin/peralatan dan membantu memasarkan produk IKM melalui pameran dan expo yang dilaksanakan tiap tahunnya. Usaha yang telah dilakukan ini kemudian memang telah membuahkan hasil dengan meningkatnya pertumbuhan wirausaha IKM yang ada di Rokan Hilir.

Tabel 3.10

Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Jumlah Wirausaha IKM



Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat
Persentase pertumbuhan wirausaha IKM	1.6%	12.55%	784.4%	Melebihi Target

5. Meningkatnya nilai ekspor

Capaian kinerja sasaran dari meningkatnya nilai ekspor diukur melalui indikator persentase kenaikan nilai ekspor produk ke Luar Negeri dengan didukung Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor serta Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional. Program ini dijabarkan lagi dengan tiga kegiatan. Namun tidak satupun dari kegiatan ini yang terealisasi atau bisa dikatakan tidak terlaksana sama sekali. Terjadinya realisasi anggaran menjadi penyebab kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.

Akan tetapi meskipun tidak satupun kegiatan yang terlaksana, data ekspor yang tercatat menunjukkan bahwa ekspor perikanan tetap berjalan sebagaimana biasanya walaupun mengalami penurunan. Produk ekspor itu sendiri terdiri dari produk perikanan hidup dan produk perikanan mati dengan total nilai ekspor adalah Rp.340.298.625,-

Penurunan ini disebabkan karena hasil perikan dari propinsi Sumatra Utara khususnya Kabupaten Tanjung Balai Asahan yang semula proses ekspornya melalui Kabupaten Rokan Hilir, yaitu di Kecamatan Pasir Limau Kapas, untuk tahun 2019 tidak lagi karena mereka telah mempunyai fasilitas ekspor sendiri jadi tidak lagi melalui Pasir Limau Kapas.

Banyak hal yang harus dibenahi agar geliat ekspor di daerah Kabupaten Rokan Hilir bisa menjadi berkembang dan menjadi andalan pemasukan pendapatan daerah dari sektor perdagangan. Beberapa alternatif yang bisa diupayakan pemerintah daerah khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir adalah : (1) dengan melakukan diversifikasi produk agar dapat menjangkau lebih banyak konsumen, (2) Mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat lebih banyak melakukan ekspor dengan memperhatikan kualitas dan mutu, (3) Memberikan stimulant berupa insentif kepada para pelaku ekspor, khususnya para pelaku eksportir usaha kecil menengah yang baru, mulai dari segi perpajakan sampai dengan biaya promosi yang mana hal ini sangat membantu bagi eksportir-eksportir yang baru akan memulai usahanya.

Selain dari pada beberapa upaya dan alternatif diatas, kerjasama diantar para pelaku usaha dengan juga perlu dimaksimalkan karena hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dari perkembangan ekspor itu sendiri. Sinergitas antara



pemerintah dan pelaku usaha menjadi ujung tombak berhasilnya upaya-upaya yang akan diperjuangkan pemerintah daerah. Apabila antar pemerintah dan pelaku usaha tidak bersinergi maka usaha tersebut tidak akan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Tabel 3.11
Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Nilai Ekspor

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat
Persentase kenaikan jumlah pelaku eksportir	1,5%	0.5%	33.3%	Sangat Kurang

6. Meningkatnya usaha sektor perdagangan yang berkelanjutan dan berkualitas

Capaian kinerja sasaran dari meningkatnya usaha sektor perdagangan yang berkelanjutan dan berkualitas diukur melalui indikator persentase pertumbuhan jumlah usaha dagang mikro kecil menengah (UMKM) dan usaha dagang besar dengan didukung oleh dua program kegiatan, yaitu program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu "Misi Dagang dan Lelang Komoditi" dan "Pameran Dagang Dalam Negeri" dengan total anggaran Rp.553.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp.283.831.100,- atau lebih kurang 51.3%.

Untuk pertumbuhan usaha dagang mikro, kecil menengah (UMKM) dan usaha dagang besar tidak mengalami kenaikan. Dimana tingkat capaian indikator ini adalah 0%. Secara umum kendala yang dihadapi adalah dari segi permodalan, administrasi dan juga teknologi.

Modal merupakan kendala utama yang dihadapi oleh setiap pengusaha baik itu usaha mikro, kecil maupun menengah. Hal ini disebabkan dalam rangka pengembangan bisnis ataupun usaha yang sudah ada, para pelaku usaha harus mempersiapkan banyak hal yang berkaitan dengan permodalan, sedangkan dukungan dari pemerintah belum memadai untuk membantu usaha mereka. Sedangkan untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak swasta sangatlah berat karena masih berstatus usaha mikro kecil yang seringkali tidak dilirik lembaga perbankan.

Sedangkan dari segi administrasi, para pelaku usaha masih belum bisa menerapkan sistem manajemen keuangan didalam dunia usaha mereka. Sehingga laporan keuangan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi disebabkan sistem yang masih manual sehingga seringkali pelaku usaha mencampuradukkan antara pengeluaran



pribadi dan juga pengeluaran perusahaan yang mana dampaknya akan sangat mempengaruhi perkembangan usaha mereka.

Kemudian yang terakhir adalah kurangnya kualitas SDM dari pelaku usaha dalam pemanfaatan teknologi. Teknologi dan penelitian biasanya seringkali dilakukan oleh kalangan perguruan tinggi dan juga pemerintah, dalam hal ini hendaknya para pelaku usaha harus melakukan sinergi dengan perguruan tinggi dan pemerintah sehingga hasil teknologi dan penelitian dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Tabel 3.12

Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Usaha Sektor Perdagangan yang Berkelanjutan dan Berkualitas

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat
Persentase pertumbuhan jumlah usaha dagang mikro, kecil, menengah (UMKM) dan usaha dagang besar	3,2%	0%	0%	Sangat Kurang

7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana perdagangan

Untuk indikator dari sasaran ini mengalami perubahan setelah dilakukan evaluasi, dimana indikator sebelumnya ada empat yaitu jumlah pasar tipe A,B,C, dan D diganti dengan indikator persentase pasar rakyat yang direvitalisasi/dibangun dengan target tahun 2019 adalah 5%. Indikator ini didukung oleh program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan jumlah kegiatan sebanyak 11 kegiatan. Total anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian target indikatornya sendiri adalah Rp.7.822.147.000,- dengan realisasi sebesar Rp.6.501.555.450,-

Apabila dilihat dari penjelasan sebelumnya, tingkat capaian dari indikator ini adalah sebesar 500% atau terealisasi 25% dari target yang hanya di kisaran 5%. Pencapaian ini sangat signifikan dan berbanding terbalik apabila dilihat dr pencapaian tahun sebelumnya dimana hanya ada beberapa pasar yang direvitalisasi.

Tahun 2019 terjadi peningkatan dimana ada 13 unit pasar yang telah direvitalisasi, dan 2 unit pasar yang dilakukan pembangunan. Pasar yang direvitalisasi adalah Pasar Bintang, Pasar Bangko Jaya, Pasar Cempedak Rahuk, Pasar Bantaian, Pasar Jumrah, Pasar Siti Maryam, Pasar Sungai Bakau, Pasar Tanah Putih Tj. Melawan, Pasar Banjar XII, Pasar Tanah Merah, Pasar Datuk Rubiah, Pasar Pematang Ibul, Pasar Sentral.



Sedangkan pasar yang dilakukan pembangunan adalah Pasar Kecamatan dan Pasar Sei Manasib.

Ketersediaan dana yang memadai merupakan faktor yang penting sebagai barometer terlaksananya kegiatan, sehingga apabila kegiatan dapat berjalan dengan baik maka target dari sebuah indikator dapat tercapai sesuai dengan yang ditetapkan. Apabila dilihat dari segi anggaran, dimana terdapat sekitar Rp.7,8 M untuk sarana revitalisasi pasar dan terealisasi sekitar 83.11%, maka tidak heran apabila capaian indikator ini mengalami kenaikan yang cukup drastis. Ketersediaan dana dan kesiapan SDM untuk melakukan kegiatan sangat penting. Selain itu kegiatan yang tepat sasaran juga merupakan hal yang juga harus diperhatikan sebagai tolok ukur keberhasilan dari segi perencanaan.

Namun begitu, masih banyak hal yang tetap harus diperbaiki terkait isu penting pengembangan pasar-pasar tradisional yang ada menuju pasar modern yang lebih berkembang dan sesuai dengan SNI, karena belum ada satupun pasar di Rokan Hilir yang memiliki standar SNI.

Tabel 3.13

Realisasi Indikator Sasaran Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana Perdagangan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat
Persentase pasar rakyat yang direvitalisasi/dibangun	5	25	500%	Sangat Baik

8. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

Sedangkan untuk capaian kinerja sasaran stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting diukur melalui indikator koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan didukung oleh Program Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri melalui kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting serta kegiatan Operasi Pasar guna menekan harga pasaran tetap stabil dengan total anggaran sebesar Rp.498.950.000,- terelalisasi sebesar Rp.120.264.000,-.

Berdasarkan hasil dari pemantauan harga barang kebutuhan pokok, kenaikan harga berkisar diangka 1% dari jumlah keseluruhan harga barang kebutuhan

pokok. Koefisien keberagaman/variasi harga masih berkisar diangka <9 sehingga capaian untuk indikator ini mencapai angka 100% ditahun 2019.

Tabel 3.14
Realisasi Indikator Sasaran Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat
Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	<9	<9	100%	Tercapai/Sesuai Target

9. Meningkatnya perlindungan konsumen dan tertib niaga

Untuk sasaran strategis meningkatnya perlindungan konsumen dan tertib niaga diukur melalui dua indikator yaitu persentase jumlah UTTP bertanda tera sah terhadap total UTTP dengan target 23% dengan didukung oleh program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan melalui total anggaran Rp.1.455.350.000,- dengan realisasi sebesar Rp.992.349.804, dan indikator yang lain adalah persentase pengawasan disektor perdagangan dengan target sebanyak 5% didukung oleh program yang sama dengan total besaran anggaran adalah Rp.334.500.000,- dengan realisasi Rp.35.323.500,-

Realisasi dari target indikator persentase jumlah UTTP bertanda tera sah adalah sebesar 21% dengan jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah adalah 935 unit dari total 4.415 unit alah UTTP yang belum bertanda tera sah. Dari target yang telah ditetapkan yaitu 23% maka capaian untuk indikator ini adalah sebesar 91,3%. Meskipun dikategorikan dengan prediket tidak tercapai, namun dengan capaian 91,3% untuk jumlah UTTP bertanda tera sah hal ini merupakan sebuah capaian yang cukup baik meskipun pada tahun sebelumnya tingkat capaian untuk indikator ini mencapai angka 150%.

Ada beberapa faktor yang masih menghambat kinerja pelayanan dari Bidang Metrologi ini sehingga belum berjalan dengan maksimal. Diantaranya adalah masih kurangnya SDM yang mumpuni untuk melakukan pelayanan Tera Ulang tersebut yang terdiri dari pejabat fungsional tertentu yang memang harus telah memiliki keahlian dan sertifikasi melalui pendidikan dibidang kemetrolgian. Selain itu Bidang kemetrolgian masih dalam proses perbaikan sistem pelayanan berbasis aplikasi dengan target tahun 2020 telah akan mulai beroperasi sehingga diharapkan pelayanan dapat lebih maksimal.



Selain itu masih kurangnya kesadaran para pedagang pemilik alat-alat UTTP tentang pentingnya pelaksanaan Tera dan Tera Ulang ini terkait perlindungan konsumen, maka pelaksanaan Tera dan Tera Ulang ini sedikit terhambat meskipun tidak begitu signifikan.

Sedangkan besar capaian untuk indikator persentase pengawasan disektor perdagangan adalah 0%. Ada banyak faktor penyebab tidak tercapainya indikator ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 23 disebutkan bahwa kewenangan pelaksanaan perlindungan konsumen telah dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi sehingga kabupaten/kota mengalami kesulitan dalam hal koordinasi dengan pihak provinsi sehingga tidak jarang pelanggaran disektor perdagangan sulit untuk dipantau. Selain itu masih minimnya SDM dibidang perdagangan sehingga masih banyaknya pelaksanaan kegiatan dibidang perdagangan yang tidak dapat terlaksana.

Tabel 3.15

Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat
% Jumlah UTTP bertanda tera sah terhadap total UTTP	23%	21%	91.3%	Melebihi Target
Persentase pengawasan di sektor perdagangan	100	0%	0%	Sangat Kurang

10. Meningkatnya akuntabilitas organisasi

Untuk sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas organisasi terdapat tiga indikator pengukuran, yaitu Nilai Evaluasi SAKIP Disperindag, Level Maturitas SPIP Disperindag dan Nilai Reformasi Birokrasi Disperindag.

Realisasi untuk indikator pertama yaitu Nilai Evaluasi SAKIP Disperindag adalah B sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau dengan capaian 100%, sedangkan untuk indikator berikutnya yaitu Level Maturitas SPIP Disperindag belum bias dilakukan pengukuran karena untuk penilaian SPIP tahun 2019 masih akan dilakukan peninjauan ulang terhadap dokumen-dokumen dan kelengkapan SPIP. Sedangkan untuk indikator yang ketiga yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Disperindag juga tidak bisa diukur karena

adanya kesalahan penetapan indikator dimana untuk nilai Reformasi Birokrasi tersebut hanya ada penilaian untuk tingkat kabupaten, sedangkan untuk setara OPD belum ada penilaian sama sekali. Untuk itu mungkin untuk tahun berikutnya akan dilakukan peninjauan kembali untuk indikator Nilai Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.16

Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat
Nilai Evaluasi SAKIP Disperindag	B	B	100%	Tercapai/Sesuai Target
Level Maturitas SPIP Disperindag	Level 3	n/a	0%	Tidak Tercapai

3.5. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Analisis Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran

Penggunaan biaya untuk mencapai sasaran strategis tahun 2019 sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2019 dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2019, untuk mencapai 10 sasaran strategis adalah Rp.19.649.923.500,- dengan realisasi sebesar Rp.14.609.947.369,- atau sebesar 74.4%.

Dari perbandingan serapan keuangan dengan capaian kinerja dapat dinilai efisiensi dalam pencapaian sasaran. Nilai Capaian Kinerja yang melebihi serapan anggaran menunjukkan adanya efisiensi. Sebaliknya, apabila serapan anggaran melebihi nilai capaian kinerja maka dapat disimpulkan pencapaian sasaran tidak efisien.

Berikut adalah data anggaran dan penggunaan dana untuk masing-masing sasaran strategis :

Tabel 3.17

Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2019



No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	% serapan Anggaran	% rata-rata capaian kinerja sasaran	keterangan
1	Meningkatnya mutu produk industri	90.000.000,-	86.709.500,-	96,34	101,5	Efisien
2	Meningkatnya produksi industri kreatif	380.860.000,-	247.999.300,-	65,12	256,3	Efisien
3	Terwujudnya sentra IKM yang berbasis potensi daerah	444.000.000,-	329.021.000,-	74,10	0	Tidak Efisien
4	Meningkatnya jumlah wirausaha IKM	606.933.000,-	290.620.800,-	47,9	784,4	Efisien
5	Meningkatnya nilai ekspor	355.200.000,-	0,-	0	0	Tidak Efisien
6	Meningkatnya usaha sektor perdagangan yang berkelanjutan dan berkualitas	1.156.400.000,-	567.662.200,-	49,08	0	Tidak Efisien
7	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana perdagangan	7.822.147.000,-	6.501.555.450,-	83,1	500	Efisien



8	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	498.950.000,-	120.264.000,-	24,1	100	Efisien
9	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	299.270.000,-	98.060.000,-	32,8	100	Efisien
10	Meningkatnya perlindungan konsumen dan tertib niaga	1.789.850.000,-	1.027.673.304,-	57,4	46,65	Tidak Efisien
11	Meningkatnya akuntabilitas organisasi	7.248.800.000,-	5.722.272.915,-	78	33,3	Tidak Efisien

BAB IV PENUTUP



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dalam mendukung pencapaian misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, serta dalam rangka pereujudan *good governance*. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

Laporan ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan pada tahun 2019 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan beserta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana tercantum pada bab tiga, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian kinerja sasaran strategisnya masih ada beberapa indikator yang masih belum tercapai yaitu 7 dari 13 indikator sasaran strategis.

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran yang dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran, dimana terdapat 6 kinerja sasaran yang bisa dikatakan masuk kedalam kategori efisien, sedangkan 5 kinerja sasaran lainnya masih dikategorikan belum efisien.

Dengan terindikasi masih banyaknya capaian kinerja yang belum sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan, maka menjadi penting bagi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar untuk lebih mengoptimalkan pelayanan melalui program dan kegiatan yang benar-benar bisa menunjang untuk capaian kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu perlu adanya komitmen dari pemerintah sendiri untuk lebih memperhatikan dan memprioritaskan alokasi dana pada APBD terkait program dan kegiatan yang seyogyanya dapat mendukung visi misi Pemerintah sehingga kedepannya dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dibuat semoga dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi kita bersama.



Bagansiapiapi, Februari 2020
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
DAN PASAR KABUPATEN ROKAN HILIR



Drs. H. SOFIYALAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 4900425198602 1 002



LAMPIRAN
LAPORAN AKUNTABILAS KINERJA PEMERINTAH
(LAKIP)
